

Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember Studi Tentang Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Analysis Of The Implementation Of Creative Economy Policies By The Jember Regency Tourism And Culture Office: A Study Of Efforts To Encourage Regional Economic Growth

Dhamar Hardian Putra¹, M Hamdi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: dhamarhardianputra@gmail.com¹, hamdi.hs@unmuhjember.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan Sebagai kerangka analisis yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kreatif di Jember telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang cukup jelas, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Komunikasi kebijakan masih bersifat top-down, koordinasi lintas sektor belum optimal, dan alokasi anggaran belum memadai. Meski demikian, terdapat inisiatif-inisiatif lokal yang menunjukkan arah positif, seperti kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas kreatif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, serta pelibatan aktor nonpemerintah secara strategis untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pertumbuhan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of creative economy policies by the Department of Tourism and Culture of Jember Regency in promoting regional economic growth. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, field observations, and documentation studies. Edward III's policy implementation model was used as the analytical framework, encompassing four main variables: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that creative economy policies in Jember Regency are supported by a relatively clear legal and institutional framework. However, their implementation continues to face several structural and technical challenges. Policy communication remains predominantly top-down, cross-sectoral coordination has not been fully optimized, and budget allocation is still inadequate. Nevertheless, several local initiatives demonstrate positive progress, particularly collaborations between the local government and creative communities. This study highlights the importance of strengthening institutional capacity, ensuring sustainable funding, and strategically involving non-government actors to establish a sustainable creative economy ecosystem at the regional level.

Keywords: Creative Economy, Public Policy, Policy Implementation, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi kreatif kini menjadi pilar strategis dalam menggeser ketergantungan pembangunan nasional dari eksploitasi sumber daya alam menuju pemanfaatan inovasi intelektual manusia. Pergeseran paradigma ini menempatkan ide orisinal sebagai mesin utama yang menggerakkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja secara masif di era globalisasi. Transformasi tersebut memerlukan kesiapan daerah untuk mengelola potensi lokal agar mampu bersaing melalui ekosistem berbasis pengetahuan yang kuat

Pemerintah merespons tantangan tersebut melalui penguatan landasan hukum nasional yang mengarahkan arah pengembangan ekosistem kreatif secara sistematis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 berfungsi sebagai regulasi payung yang memberikan mandat bagi daerah untuk mengintegrasikan potensi lokal dalam rencana aksi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Jember merealisasikan amanat ini lewat penerbitan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 serta sinkronisasi program dalam RPJMD 2025-2029 guna mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kabupaten Jember memiliki modal budaya yang kuat melalui subsektor fesyen, kuliner, dan seni pertunjukan yang tecermin dalam keberhasilan *Jember Fashion Carnaval* (JFC) di tingkat internasional. Pelaksanaan kebijakan di lapangan nyatanya masih terbentur berbagai hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran daerah serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara dokumen kebijakan dan realitas praktik yang perlu dievaluasi secara mendalam menggunakan kerangka analisis model Edward III.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat daerah. Pemahaman mengenai variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi faktor penghambat pertumbuhan ekosistem kreatif lokal. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku kreatif demi mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Metode kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, dinamika kelembagaan, serta tantangan kontekstual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi kreatif adalah sektor yang berkembang dari ide, pengetahuan, dan kreativitas seseorang. Bidang ini mencakup banyak hal, seperti desain, musik, film, kuliner, fashion, dan teknologi, yang semuanya menghasilkan produk atau layanan bernilai ekonomi. Implementasi kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember telah dilaksanakan melalui berbagai program yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan ini secara administratif bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari capaian PDRB Jember tahun 2024 sebesar Rp102,76 triliun dengan kontribusi signifikan dari subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Namun, riset ini menemukan adanya kesenjangan empiris (*empirical gap*) pada empat dimensi model Edward III.

Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa meskipun diseminasi kebijakan telah dilakukan melalui pelatihan dan rapat koordinasi, pola yang terbentuk masih bersifat *top-down* sehingga

membatasi partisipasi aktif pemangku kepentingan. Saluran diseminasi kebijakan yang masih didominasi pola *top-down* mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi yang cukup tajam antara birokrasi dan praktisi. Ketidakefektifan komunikasi ini tecermin dari keluhan para pelaku usaha, seperti yang diungkapkan oleh Amba (2025), bahwa informasi mengenai bantuan modal maupun program kemitraan strategis jarang menjangkau mereka secara langsung. Akibatnya, kebijakan yang disusun di tingkat pusat pemerintahan sering kali gagal menangkap denyut nadi dan dinamika kebutuhan aktual para seniman serta pengusaha lokal.

Dimensi sumber daya, ketersediaan tenaga ahli dan program pelatihan teknis menunjukkan kemajuan positif, namun efektivitasnya terkendala oleh alokasi finansial yang belum tepat sasaran. Pengelolaan instrumen pendanaan daerah menunjukkan paradoks antara tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan output yang dirasakan masyarakat. Penyerapan anggaran yang mencapai 99% ternyata belum sepenuhnya terkonversi menjadi fasilitas pendukung yang relevan, seperti ruang kolaborasi publik atau perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kreator lokal (Dhamar, 2025). Keterbatasan ini menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya finansial harus dibarengi dengan keahlian teknis aparatur dalam memetakan prioritas pengembangan subsektor kreatif yang potensial.

Dimensi Disposisi, Aparatur pemerintah perlu menggeser komitmen yang selama ini cenderung bersifat seremonial menjadi pembinaan rutin yang terlembaga secara sistematis. Meskipun terdapat upaya penyederhanaan perizinan, skeptisisme pelaku kreatif masih muncul akibat dukungan pemerintah yang dinilai belum menyentuh aspek praktik harian pelaku usaha. Keselarasan antara visi pimpinan dengan tindakan teknis di lapangan menjadi kunci utama untuk membangun kembali kepercayaan dan semangat kolaborasi antar-aktor

Dimensi struktur birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan efektivitas yang bersifat parsial karena lemahnya koordinasi lintas sektor dalam ekosistem pemerintahan. Meskipun pembagian peran sudah didefinisikan secara formal, integrasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat masih sangat terbatas. Kondisi birokrasi yang masih hierarkis dan kaku ini menghambat keluwesan yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi kreatif yang sangat dinamis dan inovatif. Struktur organisasi yang hierarkis dan kaku masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan layanan publik yang inklusif serta mudah diakses. Lemahnya koordinasi antar-dinas menyebabkan para pelaku kreatif mengalami kebingungan prosedural saat mencoba mengakses dukungan atau melakukan pengajuan kolaborasi (Niansyah, 2025). Reformasi tata kelola melalui penyederhanaan alur birokrasi dan transparansi Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi prasyarat mutlak untuk menghidupkan kembali gairah ekonomi berbasis pengetahuan di Jember.

Inisiatif menarik dari aktor non-pemerintah. Dr. Rendra Wirawan (Ketua UKM dan IKM Nusantara Jawa Timur) mendorong konsep "*UMKM Holding*". Gagasan ini bertujuan menyatukan pelaku kecil agar memiliki daya tawar dan akses pasar yang lebih kuat. Pendekatan kolaboratif seperti ini seharusnya dapat diadaptasi oleh Disparbud untuk memperkuat jaring komunikasi dan distribusi produk kreatif lokal.

Untuk mewujudkan ekonomi kreatif yang benar-benar menjadi motor penggerak daerah, penelitian ini merekomendasikan:

Aspek	Rekomendasi Strategis
Literasi Digital	Pelatihan intensif pemasaran digital dan manajemen keuangan bagi UMKM.
Pusat Kolaborasi	Optimalisasi ruang seperti <i>Kampoeng Creative JFC</i> sebagai pusat inkubasi bisnis, bukan sekadar ruang pameran.

Reforma si SOP	Penyederhanaan birokrasi dan transparansi akses bantuan melalui kanal digital.
Data Terintegrasi	Pendataan pelaku ekraf yang akurat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).

Temuan penelitian Hamdi et al. (2025:51) sebagai kerangka solusi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember:

- Pendekatan kolaboratif yang partisipatif, seperti penerapan *Soft Systems Methodology* (SSM), menawarkan solusi untuk mengurai kompleksitas permasalahan dalam tata kelola kreatif daerah. Sinergi yang kuat antara pemegang kebijakan dan komunitas strategis, seperti Jember Fashion Carnaval (JFC), membuktikan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah dapat menjadi katalisator bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi (Radar Jember, 2023). Melalui penguatan jejaring ini, Kabupaten Jember memiliki peluang besar untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga memberdayakan potensi manusia secara manusiawi..
- Model Governansi Kolaboratif: Menggeser pola *top-down* menjadi model tata kelola kolaboratif yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem ekonomi kreatif.
- Pelatihan Berbasis Service Quality (SERVQUAL): Sebagai solusi atas rendahnya kepuasan pelaku kreatif, disarankan penerapan pelatihan pelayanan menggunakan model SERVQUAL. Fokus utamanya adalah meningkatkan standar kualitas layanan birokrasi agar lebih profesional dalam memfasilitasi kebutuhan komunitas.
- Optimalisasi Media Digital: Memanfaatkan media digital bukan sekadar untuk publikasi searah, melainkan sebagai sarana promosi dan saluran komunikasi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan pelaku usaha.
- Penguatan Stabilitas Institusi: Dengan menciptakan struktur interaksi masyarakat yang lebih stabil melalui kebijakan yang konsisten, institusi dapat berperan dalam mengurangi ketidakpastian ekonomi di tingkat lokal.

Penerapan solusi dari penelitian Hamdi et al. (2025) ini diharapkan mampu memperkaya model Edward III dengan pendekatan kelembagaan yang lebih modern, sehingga kebijakan ekonomi kreatif di Jember tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi gerakan ekonomi yang berdampak nyata.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi kreatif di Jember sudah berjalan namun belum optimal. Kendala struktural, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan komunikasi tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Penguatan kolaborasi lintas sektor, perbaikan strategi alokasi anggaran, serta peningkatan pendekatan partisipatif sangat esensial untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kabupaten Jember

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2025, Maret 3). *Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember 2024*. <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/348/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jember-2024.html>
- Barometerpos. (2025). [Artikel tentang Ruang Ekonomi Kreatif Kolektif (REK) di Jember].
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Disparbud Jember. (2023). *Laporan tahunan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Jember*.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hamdi, M., El Muhammady, I. G., & Darma, I. G. M. (2025). Kompleksitas governansi dan kelembagaan wisata bahari di Watu Ulo, Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 11(1), 45–52.
- Jatmiko, B. (2020). Kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 113.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif & BPS. (2019). *Data kontribusi PDB dan penyerapan tenaga kerja pada 17 subsektor ekonomi kreatif*.
- Kozina, I., Istenic, M., & Komac, B. (2019). Green creative environment contribution to sustainable regional development. *Sustainability*, 15(9).
- Lestari, M. (2018). Penerapan good governance dalam pengembangan industri kreatif di Kota Bandung. *Jurnal APLIKASI: Media Komunikasi dan Informasi*, 15(1), 110.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2021). *Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Radar Jember. (2023). [Berita penghargaan Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata].
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*.
- Sari, R., dkk. (2019). Analisis kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif daerah (studi kasus Kabupaten Bantul). *Jurnal Economia*, 15(2), 268-283.
- Wawancara dengan Amba. (2025, Mei). *Pelaku batik, Jember* [Hasil Wawancara]. Wawancara dengan Niansyah. (2025, Mei). *Pelaku musik independen, Jember* [Hasil Wawancara]. Wawancara dengan Nyo. (2025, Mei). *Pelaku desain dan komunitas kreatif, Jember* [Hasil Wawancara]. Wawancara dengan Reny. (2025, Mei). *Pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember* [Hasil Wawancara].
- Wibowo, D. (2021). Public governance approach in policy implementation. *Public Policy Journal*.